

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Banggai Laut

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo selama 40 hari.

"Dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari, terhitung 25 Desember 2020 sampai dengan 2 Februari 2021," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (23/12).

Dua tersangka lain yakni Recky Suhartono Godiman, orang kepercayaan Wenny; dan Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengky Thiono juga diperpanjang penahannya.

Sementara, tiga tersangka lain yakni Komisaris PT Bangun Bangkep Persada Hedy Thiono, Direktur PT Antarnusa Karyatama Mandiri Djufri Katili, dan Direktur PT Andronika Putra Delta Andreas Hongkiriwang, diperpanjang penahannya terhitung mulai 24 Desember 2020 sampai dengan 1 Februari 2021.

Kecam tersangka tersebut ditahan KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan yang berlangsung pada Kamis (3/12). Wenny dan Recky ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, sedangkan Hengky ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Kemudian, Hedy ditahan di Rutan Cabang KPK

di Gedung Merah Putih, Djufri ditahan di Rutan Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur, sedangkan Andreas ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung ACLC KPK.

"Perpanjangan penahanan dilakukan karena tim penyidik KPK masih memerlukan waktu untuk melengkapi berkas perkara para tersangka tersebut," kata Ali.

Dalam kasus ini, Wenny diduga mengatur proyek infrastruktur dan mengondisikan pelelangan di Banggai Laut. Beberapa rekanan kemudian sepakat menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk komitmen fee kepada Wenny untuk memenangkan rekanan tertentu dan kembali mendapat proyek.

Sejak September sampai November 2020, telah terkumpul uang sejumlah lebih dari Rp1 miliar yang diduga akan digunakan untuk kepentingan pilkada. "Dalam tahap penyelidikan kita melihat indikasi bahwa uang-uang yang terkumpul ini dimaksudkan untuk digunakan dalam biaya-biaya kampanye ataupun kemungkinan digunakan nanti di dalam bahasa yang sering kita dengar dengan serangan fajar," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Polmolongo, Jumat (4/12). ■ han

MA Tolak Kasasi Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar

JAKARTA (IM) - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar. Alhasil, Emirsyah tetap dihukum 8 tahun penjara dalam kasus korupsi dan pencucian uang pembelian pesawat hingga pemeliharaan pesawat Garuda.

Kasus bermula saat Garuda Indonesia membeli sejumlah pesawat. Namun ternyata Emirsyah Satar mendapatkan suap dari pihak Rolls-Royce. Uang diputar Connaught International Pte Ltd dan PT Ardyahparamita Ayuprakarsa milik Soetikno Soedarjo.

Atas hal itu, Emirsyah dan Soetikno dimintai pertanggungjawaban di depan pengadilan. Pada 8 Mei 2020, PN Jakpus menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada Emirsyah karena bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakuakan alternatif pertama.

Emirsyah juga diwajibkan mengembalikan uang korupsi ke negara senilai SGD2,1 juta. Uang pengganti tersebut harus dibayarkan selambat-lambat-

nya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar maka asetya akan disita oleh negara.

Putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada 17 Juli 2020. Vonis itu diketok oleh Wakil Ketua PT Jakarta Andriani Nurdin menjadi ketua majelis di perkara itu. Adapun anggota majelis adalah I Nyoman Adi Juliasa, Achmad Yusak, Jeldi Ramadhan, dan Anthon R Saragih.

Atas keputusan itu, Emirsyah Satar tidak terima dan mengajukan kasasi, namun ditolak MA. "Tolak," demikian bunyi amar kasasi yang dilansir website MA, Rabu (23/12).

Vonis itu diketok pada Selasa (22/12) lalu dengan ketua majelis Suhadi serta anggota Syamsul Rakan Chaniago dan Agus Yuniarto.

Bagaimana dengan Soetikno? Nasibnya lebih mujur dibandingkan Emirsyah Satar. PN Jakpus menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Soetikno. Putusan itu dikuatkan di tingkat banding, Kasasi yang diajukan Soetikno juga kandas. ■ mar



IDN/ANTARA

TINDAK LANJUT TEMUAN TGPF INTAN JAYA
Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Danpuspomad) Letnan Jenderal TNI Dodik Widjanarko (kanan) didampingi Direktur Hukum TNI AD Brigjen TNI (K) Tetty Melina Lubis menyampaikan paparan terkait tindak lanjut temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya Papua, di Jakarta, Rabu (23/12). Danpuspomad menegaskan TNI AD berkomitmen untuk transparan dalam penanganan kasus tersebut dan akan bertindak tegas bila terbukti ada anggotanya terlibat.

Lucinta Luna Tetap Dihukum 1,5 Tahun Penjara

JAKARTA (IM) - Permohonan banding kasus narkoba Ayluna Putri alias Lucinta Luna ditolak Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Alhasil Lucinta Luna tetap dihukum penjara selama 1,5 tahun dalam kasus kepemilikan narkoba jenis ekstasi.

Hal itu tertuang dalam putusan PT Jakarta yang dilansir di website-nya, Rabu (23/12). Lucinta Luna didakwa memiliki narkoba jenis ekstasi dan 7 butir psikotropika jenis rilkona. Barang bukti itu ditemukan di apartemen terdakwa saat polisi mendatangnya dan mengeledah apartemen itu.

Pada 30 September 2020, PN Jakbar menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara kepada Lucinta Luna. Majelis hakim menyatakan Lucinta Luna terbukti melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Narkotika dan Pasal 60 ayat (2) UU Psikotropika.

Atas putusan itu, jaksa yang menuntut Lucinta Luna

3 tahun penjara tidak terima dan mengajukan permohonan banding. Alasannya, hukuman itu terlalu ringan. Apa kata majelis tinggi?

"Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 September 2020 Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br, yang dimintakan banding tersebut," ujar majelis banding yang diketuai Hanizah Ibrahim dengan anggota Binsar Pamopo Pakpahan dan Daniel Dalle Pairunan.

PT Jakarta menyatakan dapat menyetujui dan membenarkan putusan PN Jakbar. Oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. ■ osm

2 Polhukam

IDN/ANTARA



SERAH TERIMA JABATAN MENTERI SOSIAL

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga pejabat lama Menteri Sosial Ad Interim Muhajir Effendi (kiri) menyerahkan Memori Jabatan Kementerian Sosial kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) dalam acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (23/12). Tri Rismaharini resmi diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliar Batubara yang tersandung kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos).

Ketua MPR Sebut FKUB Miliki Peran Penting dalam Menjaga Kerukunan

Menurut Bambang Soesatyo, aspirasi ormas keagamaan maupun masyarakat ormas yang diterima FKUB bisa dijadikan rekomendasi kepada pemerintah dan segenap pemangku kepentingan.

JAKARTA (IM) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebut Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran penting dalam hal menjaga kerukunan beragama, guna menunjang pembangu-

nan sebuah daerah. FKUB menjembatani persatuan antar umat beragama sehingga tercipta perdamaian.

"Berbagai peran penting FKUB dalam membangun kerukunan antar umat be-

ragama dapat diimplementasikan melalui penyelenggaraan dialog dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk membangun kesamaan persepsi. Maupun kegiatan penyerapan dan pengelolaan berbagai aspirasi, baik yang disalurkan melalui organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan maupun melalui perwakilan atau elemen masyarakat lainnya," kata Bamsot dalam keterangannya, Rabu (23/12).

Gagasan tersebut disam-

paikan Bamsot dalam Dialog Kebangsaan Bersama FKUB dan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Puri Den Beningah Klungkung, Bali.

Menurutnya, aspirasi ormas keagamaan maupun masyarakat yang diterima FKUB bisa dijadikan rekomendasi kepada pemerintah dan segenap pemangku kepentingan.

"Selain juga memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi atas hal-hal yang terkait dengan implementasi kehidupan beragama dan hubungan antar umat beragama. Misalnya, dalam hal pendirian rumah ibadah," urai Bamsot.

Ia menyampaikan, sebagai kepanjangan tangan pemerintah, FKUB juga bisa melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan. Selain itu, peran lainnya yaitu menjadi mitra

pemerintah pusat maupun daerah, dalam melaksanakan program-program pembangunan.

"Sehingga FKUB bersama pemerintah serta aparat penegak hukum ikut menjaga iklim sosial yang kondusif," terang Bamsot.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini mengemukakan, kerukunan hidup beragama tidak mungkin dicapai secara instan. Menurutnya diperlukan komitmen bersama dari segenap pemangku kepentingan, dan FKUB mempunyai peran sentral di dalamnya.

"FKUB perlu terus menjalankan peran strategis sebagai wahana mediasi pada setiap persoalan yang timbul dalam hubungan antar umat beragama. Khususnya, persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik sosial, baik yang bersifat laten maupun manifest," ulas Bamsot. ■ pan

ICW Kritik Penindakan di Era Firli Merosot Tajam, KPK Angkat Bicara

JAKARTA (IM) - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik KPK karena dinilai tidak gencar melakukan penindakan selama setahun kepemimpinan Firli Bahuri. KPK pun angkat bicara merespons kritik ICW.

"KPK menghargai apa yang sudah disampaikan ICW maupun TII (Transparency International Indonesia) dalam memberikan penilaian terhadap kinerja KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada wartawan, Rabu (23/12).

Ali mengatakan KPK akan segera menyampaikan capaian kinerja KPK selama setahun terakhir. Menurut Ali, data capaian kinerja itu akan disampaikan secara utuh.

"Pada akhir tahun 2020 ini akan kami sampaikan secara utuh kinerja KPK selama setahun, dan saat itu tentu akan disampaikan data terkait capaian hasil kerja KPK tersebut," ujar Ali.

Seperti diketahui, ICW mengevaluasi kinerja KPK

dalam satu tahun era kepemimpinan Firli Bahuri. ICW menyoroji bidang penindakan yang merosot tajam pada 2020.

Peneliti dari ICW, Kurnia Ramadhana, merinci data kinerja KPK pada 2020 dengan tahun sebelumnya. Ada tiga poin yang menjadi perbandingan ICW, yakni bidang penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.

"Yang pertama di penyidikan tahun 2020, KPK melakukan penyidikan sebanyak 91 kali, tapi di tahun 2019 itu lebih tinggi, tahun 2019 mencapai 145 penyidikan. Lalu di penuntutan, tahun 2019 itu ada 153 akan tetapi di 2020 merosot tajam hanya menjadi 75 penuntutan. Eksekusi pun seperti itu, di tahun 2019 ada 136 eksekusi, di tahun 2020 ada 108 eksekusi. Jadi seluruh tren penindakan ini memang menurun tajam begitu," kata Kurnia, dalam konferensi pers Evaluasi Satu Tahun KPK yang disiarkan Facebook Sahabat ICW, Rabu (23/12).

Kurnia menjelaskan men-

gapa fenomena bidang penindakan KPK menurun pada 2020 tersebut. Menurutnya, ada berbagai faktor yang mempengaruhi hal tersebut. "Yang pertama soal jumlah tangkap tangan, menurunnya jumlah tangkap tangan," katanya.

Kurnia menyebut tahun 2020 menjadi tahun paling rendah KPK melakukan tangkap tangan dibanding 4 tahun terakhir sejak 2016. Dia merinci data kegiatan operasi tangkap tangan KPK sejak 2016 hingga 2020.

"Di tahun 2016, KPK melakukan tangkap tangan sebanyak 17 kali, 2017 19 kali, 2018 30 kali, 2019 21 kali, dan di tahun 2020 ternyata hanya 7 tangkap tangan. Itu pun saat tangkap tangan masih menjadi problem hari ini karena perlakuan tak kunjung dapat ditingkatkan oleh KPK, yaitu perkara suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI yang melibatkan caleg dari PDIP dan Wahyu Setiawan komisioner KPU," ujarnya. ■ dot

Moeldoko: Tak Boleh Ada Penumpukan Orang dan Kendaraan Saat Libur Nataru

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan tidak boleh ada penumpukan orang dan kendaraan pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021. Ia meminta seluruh sektor yang terlibat dalam itu bekerja lebih keras dari biasanya. Tujuannya untuk memastikan agar warga menjaga protokol kesehatan.

"Tidak boleh ada penumpukan orang dan kendaraan. Jangan ada kerumunan dan kemacetan lalu lintas. Siapkan berbagai skenario dan mitigasi untuk mengurangi kepadatan di setiap titik tanpa terkecuali," ujar Moeldoko saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Libur Natal dan Tahun Baru 2021 secara daring di Gedung Bina Graha di Jakarta, Rabu (23/12).

Larangan berkerumun sesuai dengan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 3 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Nataru dalam Masa Pandemi Covid-19.

Moeldoko meminta semua pihak untuk mengantisipasi pergerakan orang selama masa libur Nataru, khususnya pada titik-titik kritis, kemacetan lalu lintas dan titik rawan kerumunan orang.

"Misalnya dengan rekayasa lalu lintas serta sistem buka-

tutup jalan dan rest area," tambah Moeldoko.

Rapat koordinasi dihadiri Deputi I KSP Feby C Telepta, Deputi IV KSP Juri Ardiantoro dan Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani. Selain itu hadir secara online dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Korlantas Polri, BUMN sektor transportasi dan infrastruktur serta sejumlah Pemerintah Daerah.

Rapat tersebut untuk memastikan sejumlah sektor bekerja optimal termasuk kecukupan energi serta keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). "Karena ini adalah situasi extraordinary, maka harus kita kelola dengan extraordinary pula," ujar Moeldoko.

Ia meminta aparat di seluruh sektor memberi perhatian khusus pada tempat-tempat wisata, pusat keramaian dan lokasi swab tes antigen.

"Jangan lagi ada penumpukan antrean. Kelola sistem antrean dengan baik, tambah petugas dan titik pemeriksaan, serta siapkan holding area untuk memecah kerumunan," jelasnya.

Pada rapat koordinasi ini, seluruh Kementerian/Lembaga, Pemda, hingga TNI/Polri menyatakan kesiapannya menyambut Nataru 2020-2021.

Bahkan, beberapa di antaranya sudah memulai persiapan sejak 18 Desember 2020.

Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub memaparkan akan membatasi lalu lintas mobil kendaraan barang tertentu untuk mengatasi kemacetan. Selain itu akan menambah fasilitas rest area, hingga melakukan random check rapid test antigen.

Sedangkan Ditjen Perhubungan Laut telah menyiapkan 1.186 armada dengan kapasitas 3,35 juta penumpang. Dengan begitu kesiapan di jalur laut sudah cukup baik dan tidak akan menimbulkan kerumunan.

"Semua pelabuhan kami monitor. Kerja sama juga dengan PT Pelindo (Persero) serta koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya," jelas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo.

Terkait jalur udara, Kemenhub pun telah menerapkan berbagai kebijakan penerbangan dengan mengacu pada surat edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 3 tahun 2020. Adapun baik dari Kementerian ESDM, Pertamina, dan PLN memastikan telah menyiapkan berbagai upaya dalam menyediakan ketersediaan energi, baik dari sisi kelistrikan hingga bahan bakar minyak. ■ dot

Sandiaga Diminta Cepat Beradaptasi, Buat Terobosan Sektor Parekraf

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo melantik Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf). Komisi X meminta Sandiaga cepat beradaptasi dalam jabatan barunya.

"Pertama saya ucapkan selamat bertugas mengabdikan Mas Sandiaga. Yang kedua, kita ingin Mas Sandi bisa berlari cepat sebagaimana hobi beliau suka lari. Nah, saya ingin, kita ingin semuanya dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini harus ditangani dengan cepat," kata Ketua Komisi X Syaiful Huda kepada wartawan, Rabu (23/12).

Menurut Huda, pandemi corona membuat turis di Indonesia menurun secara drastis. Oleh sebab itu, ia berharap Sandiaga dapat membuat terobosan guna meningkatkan jumlah turis.

"Turis tahun sebelumnya tahun 2019 ada sekitar 11 sampai 12 juta. Tahun 2020 hanya 170-an ribu yang hadir ke Indonesia. Akhirnya devisa dari sektor pariwisata drop. Hampir 88 persen. Oleh karena itu, ini butuh lompatan terobosan," ungkapnya.

Wasekjen PKB itu juga mengatakan Wishnutama sudah cepat dalam menjalankan tugas sebagai Menparekraf sebelumnya. Namun ia pun menilai Jokowi memiliki pertimbangan lain sehingga mengganti kursi Menparekraf. "Mas Tama sebelumnya sudah menangani dengan cepat, tapi mungkin Pak Presiden ada opsi lain terkait sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," ungkapnya.

Diketahui, Wishnutama Kusubandio resmi menyerahkan jabatannya kepada Sandiaga Uno. Wishnutama berharap

Sandiaga dapat mengatasi dampak pandemi corona pada sektor parekraf.

"Beliau ini (Sandiaga Uno) orang yang saya kagumi sejak lama dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau, pariwisata dan ekonomi kreatif akan jauh lebih baik ke depan. Setelah belakangan ini kita menghadapi pandemi yang sangat besar sekali, khususnya yang menghantam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini adalah tantangan yang luar biasa dan tentunya akan menjadi tantangan yang juga luar biasa bagi Bang Sandi ke depannya," kata Wishnutama.

Wishnutama menjelaskan, sebanyak 13 juta orang yang bekerja di sektor wisata terkena dampak pandemi Covid-19. Begitu pun di sektor ekonomi kreatif, yang jumlahnya nyaris 20 juta orang. Inilah nantinya yang akan menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan Sandiaga Uno sebagai Menparekraf.

"Saya tetap yakin di bawah kepemimpinan Bang Sandi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita bisa bangkit dan jauh lebih baik dari sebelumnya," kata Wishnutama. ■ vit

PENGUMUMAN PENURUNAN MODAL DASAR PT JASINDO SARANA GRAHA

Direksi PT Jasindo Sarana Graha ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Kreditor Perseroan bahwa kepada semua Kreditor apabila ada keberatan Saham Luar Biasa telah diadakan tanggal 4 Desember 2020, Para Pemegang Saham telah menyetujui atas penurunan Modal Dasar dari semula sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kepada Kreditor dan Debitur dari Perseroan yang keberatan atas penurunan modal tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan, selama 60 hari kerja sejak penandatanganan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dilakukan.

Jakarta, 24 Desember 2020
Direksi
PT Jasindo Sarana Graha

PENGUMUMAN LIKUIDASI

Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT KOWIN JAYA SUKSES, berkedudukan di Jakarta Utara, pada tanggal 21 Desember 2020 Perseroan telah diumumkan terhitung sejak tanggal tersebut, dan selanjutnya Perseroan dinyatakan "dalam likuidasi".

Sehubungan dengan hal tersebut maka kami, Direktur selaku Likuidator memanggil segenap Debitur dan Kreditor untuk menyelesaikan hutang piutangnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal pengumuman ini di Jalan Cempaka Mas Blok C2 Lt. 2/3, RT 004, RW 008, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, U. P. Ny. LEE SU JIN.

Demikianlah Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Likuidator
Lee Su Jin

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham BOGA CITRA LESTARI, berkedudukan di Jakarta Utara, Perseroan, tertanggal 20 Desember 2020, telah disetujui untuk menurunkan modal dasar Perseroan menjadi Rp. 1.000.000.000,- dan modal ditempatkan dan di setor Perseroan menjadi Rp. 1.000.000.000,-.

Sehubungan dengan hal tersebut maka kami, Direksi memberitahukan dan mengumumkan kepada semua Kreditor apabila ada keberatan/sanggahan atas penurunan modal tersebut, dapat menyampaikan keberatannya/sanggahan disertai alasannya kepada kami di Jl. Mantang Blok L Gg II No. 6, RT004, RW012, Kel. Lagoa, Kec. Kojak Jakarta Utara, dalam 60 hari kalender sejak pengumuman ini.

Demikianlah Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 jo 45 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Direksi Perseroan
Suryarintin